

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat enja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja;
2. Penyiapan data dan informasi;
3. Penyusunan rancangan awal;
4. Perumusan rancangan;
5. Verifikasi rancangan;
6. Perumusan rancangan akhir;
7. Verifikasi rancangan akhir; dan
8. Penetapan Perubahan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Perubahan Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Perubahan Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Satuan Polisi Pamong Praja

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
 16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 68);
 17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan perubahan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Menselaraskan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan perubahan RKPD tahun 2025;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana kerja Anggaran Perubahan (RKA-P);
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan;
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Anggaran tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sebesar Rp. 12.272.237.433,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.463.746.520,- atau 44,52%. terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	47,40%	48,26%
Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umumdari

	Kinerja	Keuangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,36%	37,62%
Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Total Rata rata – rata capaian kinerja seluruh program adalah sebagai sebagai berikut :

	Kinerja	Keuangan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	39,65%	44,52%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Tabel 2.1.1
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN BELITUNG TRIWULAN II TAHUN 2025
Nama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	0,00	-	100,00	8.017.683.922	7.959.299.663	1.847.977.650	1.993.418.120					3.841.395.770	0,00%	48,26%	100,00	11.859.079.692				0,00%		
			Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	0,00		67,00		75,44							-		0,00%		75,44						
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	0,00		100,00		100							-		0,00%		100,00						
			Persentase pemerintahan sarana dan prasarana aparatur (persen)	0,00		100,00		100							-		0,00%		100,00						

		Dokumen hasil perencanaan pengembangan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.635.915.046	44,00	6.635.915.046	43	8.818.536.000	1.476.630.153	1.708.024.690	-	-	-	-	-	46,72%	0,00%	9.821.569.889	0,00%	0,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	2,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terpenuhnya administrasi kepegawalan Perangkat Daerah (Orang)	143,00	-	446.093.598	142	56.657.500	137	46.662.000	-	-	-	-	-	82,36%	0,00%	492.755.588	0,00%	0,00%
	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1,00	-	348.450.000	2	42.457.500	-	37.150.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	385.600.000	0,00%	0,00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6,00	-	97.643.598	5	14.200.000	-	9.512.000	-	-	-	-	-	66,98%	0,00%	107.155.598	0,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhnya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	-	478.122.504	1	534.572.313	0	173.469.630	-	-	-	-	-	54,74%	0,00%	770.741.834	0,00%	0,00%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1,00	11.780.000	1	15.851.577	1	3.924.500	-	1.907.500							25,00%	36,79%	1,25	17.612.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2,00	96.177.400	2	112.009.182	2	45.204.400	-	25.707.500							25,00%	63,31%	2,50	167.089.300	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1,00	11.741.000	1	15.984.222	1	3.953.000	-	4.953.500							25,00%	55,72%	1,25	20.647.500	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2,00	182.394.500	2	248.236.920	2	51.774.500	-	72.224.500							25,00%	49,95%	2,50	306.393.500	0,00%	0,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	1,00	46.795.000	1	41.990.412	1	7.671.000	-	5.910.000							25,00%	32,34%	1,25	60.376.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	1,00	4.800.000	1	6.000.000	1	800.000	-	1.200.000							25,00%	33,33%	1,25	6.800.000	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	12,00	124.434.604	12	94.500.000	2	60.142.530	2	7.246.400							16,67%	71,31%	14,00	191.823.534	0,00%	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah (Jenis)	-		-	6	30.573.840	-	-	-	-							0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-			40	-	-	-	-	-							0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan (Unit)	-			10	30.573.840	-	-	-	-							0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-			0	-	-	-	-	-							0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-			0	-	-	-	-	-							0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)	-	0,00	126.845.584	1	150.178.200	0	29.688.344	-	29.852.680	-	-	-	59.541.024	0,00%	39,65%	0,00	186.386.608	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	12,00	5.000.000	12	7.000.000	3	2.000.000	3	-	3	3	2.000.000	25,00%	28,57%	15,00	7.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12,00	88.667.384	12	110.000.000	3	22.158.644	3	21.558.130	3	3	43.716.774	25,00%	39,74%	15,00	132.384.158	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12,00	33.178.200	12	33.178.200	3	5.529.700	3	8.294.550	3	3	13.824.250	25,00%	41,67%	15,00	47.002.450	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Jenis)	-	-	330.707.190	5	368.781.810	5	168.189.223	-	88.729.350	-	-	256.918.573	0,00%	69,67%	0,00	587.625.763	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	23,00	186.351.050	23	191.803.410	23	39.116.850	23	73.379.350	23	23	112.496.200	100,00%	58,65%	46,00	298.847.250	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	98,00	48.605.000	103	61.712.670	18	14.815.000	18	15.350.000	18	18	30.165.000	17,48%	48,88%	116,00	78.770.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	3,00	95.751.140	3	115.265.730	2	114.257.373	2	-	2	2	114.257.373	66,67%	99,13%	5,00	210.008.513	0,00%	0,00%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	47,40%	48,26%				

	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	0	-	948.490.000	3	154.234.000	3	-	-	-	90.551.500	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	-	12,00	1.234.858.000	12	1.234.858.000	12	0	-	948.490.000	3	154.234.000	3	-	-	-	90.551.500	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Peraturan yang Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Peraturan yang Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	-	12,00	30.184.500	12	32.865.000	3	3.478.000	3	32.865.000	3	3.478.000	3	6.687.500	3	10.165.500	25,00%	30,93 %	15,00	40.350.000	1.479.643.500	15,00	25,81%	0,00 %	0,00 %
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dasar dan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah yang Terlayani (Laporan)	-	1,00	1.680.000	1	6.095.570	1	-	1	6.095.570	1	-	1	-	-	-	100,00 %	0,00%	2,00	1.680.000	1.680.000	2,00	0,00%	0,00 %	0,00 %
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	-	11,00	49.800.000	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11,00	49.800.000	49.800.000	11,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda (Persen)	-	295,00	27.841.750	1	22.460.000	0	2.876.000	-	3.616.250	-	-	-	6.492.250	0,00%	28,91%	295,00	34.334.000	0,00%	0,00%	
	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	-	12		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	-	12,00	27.841.750	12	22.460.000	3	2.876.000	3	3.616.250	3	3	6.492.250	25,00%	28,91 %	15,00	34.334.000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang di bina (Orang)	-		-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	*Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	-		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						
																Predikat Kinerja						
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						
															12.272.237.433	39,65%	44,52%					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						
																Sangat Rendah						

2.2. Analisis pengendalian pelaksanaan renja 2025 triwulan II

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, faktor keberhasilan kinerja adalah pelaksanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan sedangkan factor penghambat kinerja adalah terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategi	IKU/Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Kinerja Triwulan II		Program/ Kegiatan	Besaran Anggaran (Rp)	
				Capaian	%		Pagu Anggaran	Yang digunakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.312.937.770	1.622.350.750
								37,62%
1	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	50%	50%	1.1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.290.477.770	1.615.858.500
								37,66%
2	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	40%	36%	91%	1.2.1 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	22.460.000	6.492.250
								28,91%

Pengukuran capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA OPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke 1. " Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat "

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/Kualitatif)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah gangguan pengaduan yang ditangani	100%	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	Jumlah pengaduan yang ditangani = 36 Kasus Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 36 Kasus	36/36 x100% x2/4	50%	50%	hasil penghitungan rumus indikator di kali2/4 dikarenakan target waktu merupakan 2/4 dari target waktu dalam rumus perhitungan

2. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke 2. " Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada " ,

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/Kualitatif)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah perda dan perkada yang Memuat sanksi yang ditegakkan	40%	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 16 Perda umlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 22 Perda	16/22 x 100%x2/4	36%	91 %	hasil penghitunga n rumus indikator di kali 2/4 dikarenakan target waktu merupakan 2/4 dari target waktu dalam rumus perhitungan

Penjelasan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA OPD		
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025		
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025		
1.	Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategi Ke-1. " Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat"	
No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan indikator kinerja "Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan" sebesar 100% atau , rumusan penghitungan indikator adalah = (Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%).
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Kinerja pada triwulan II adalah 50 % dari target 100% dengan persentase capaian pada triwulan 2 sebesar 50 %
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	kinerja pada tahun 2024 capaian Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan adalah 100% Sama dengan pencapaian tahun 2023.
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	-
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Out Come program dan kegiatan adalah Terlayannya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dan Out Put nya adalah Tersedianya Laporan Hasil Penanganan Ganngguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, penyerapan anggaran pencapaian sasaran strategis 1 pada triwulan I adalah 37,66%
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum secara rutin dan terjadwal dan berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Keterbatasan Sarana prasarana, Sumber daya pendukung Operasional dan Kompetensi Personil Satpol PP
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	Melakukan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum secara rutin dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi personil serta koordinasi dengan pihak terkait.

2.	Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategi Ke-2. "Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada"	
No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan Indikator "Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan", rumusan perhitungan adalah = "Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%".
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Kinerja pada triwulan II adalah 36 % dari target 40% dengan persentase capaian pada triwulan 2 sebesar 91 %
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	kinerja pada tahun 2024 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan adalah 73 % meningkat dari tahun 2023 yaitu 62,5 %
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Out Come program dan kegiatan adalah Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Out Put nya adalah, Persentase Penegakan Perda, penyerapan anggaran pencapaian sasaran strategis 2 pada triwulan II adalah 28,91 %
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	Pelaksanaan operasional penegakan Perda dan Perkada melalui Pengawasan dan penertiban dilakukan secara rutin, Koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait sebagai stakeholder pengampu Perda dan Perkada.
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Ketentuan Perda dan Perkada belum dipahami secara memadai dan belum di taati secara baik oleh masyarakat/badan hukum yang ditemui dilapangan, belum maksimalnya dukungan Sumberdaya dalam operasional penegakan perda .
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	Melakukan operasional sosialisasi, pengawasan, penertiban dan evaluasi secara rutin/berkala serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait , memperkuat komunikasi antar lintas bidang dalam internal Satpol PP Kab. Belitung, meningkatkan Sarana & Prasarana dan fasilitas penunjang serta dukungan Sumber daya dan Anggaran penunjang kinerja.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Renstra 2024-2026 pencapaian kinerja dengan indikator Persentase Penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada memenuhi target namun perlu dioptimalkan dengan pengembangan dan penambahan fokus peraturan-peraturan produk hukum daerah yang berlaku agar implementasi Perda dan Perkada yang berlaku menghasilkan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja selama kurun waktu lima tahun, sebelumnya telah banyak upaya – upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Belitung, namun terdapat beberapa hambatan utama yaitu :

- a) Masih tingginya pelanggaran Perda dan Perkada dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Masih minimnya ketersediaan sumber daya aparatur yang kompeten disetiap unit kerja;
- c) Masih kurang sarana dan prasarana pelayanan;
- d) Belum optimalnya upaya koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2024 telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel 3.3.1

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung tahun 2024, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P). Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk tahun anggaran perubahan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

Tabel 3.3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah	Target Pagu Indikatif (Rp)	18	19			20											
				8	9	10	11	12									13		14	15		16	17				
				1	2	3	4	5	6	7																	
			Satuan Polisi Pamong Praja				13.331.267.283 12.977.558.132 12.092.360.204																		17.405.055.700		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
1	1	05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan			100 %	100 %	8.861.268.853	8.395.041.008	7.948.117.659									9.704.100.000							
1	05	01	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	3.842.000,00	3.842.000,00	0					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	4.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						

1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.976.284.985,00	6.822.439.400,00	6.282.635.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	6.704.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

**Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
KABUPATEN BELITUNG Tahun 2025**

[illegible]

1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Milik Daerah	-				6 Jenis	6 Jenis	168.049.560,00	181.886.820,00	333.658.230,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	425.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	55.042.680,00	53.691.800,00	4.245.750,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	17 Unit	113.006.880,00	118.195.020,00	296.112.480,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	-			5 Jenis	533.228.740,00	563.182.770,00	424.281.810,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	565.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	219.704.370,00	219.704.370,00	191.803.410,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														

1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Laporan hasil Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	-		1 Dokumen	1 Dokumen	4.330.644.890,00	4.123.782.545,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	7.435.955.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	36.586.030,00	45.405.925,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		325.955.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.310.800,00	8.029.731.050,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		3.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													

1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	-		100 %	44.353.540,00	44.353.540,00	20.460.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100 %	25.691.320,00	25.691.320,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, (DAU) Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12 Laporan	18.662.220,00	18.662.220,00	20.460.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, (DAU) Semua Kel/Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota	Jumlah PPNS yang di bina	-				11 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah															
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				2 Laporan	0 Laporan	95.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung & Tanjung Pandan, Lesung Batang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
										J U M L A H	13.331.267.283	12.977.558.132	12.092.360.204					17.405.055.700		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 perubahan.

Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Belitung dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini di susun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Atas semua perhatian diucapkan terima kasih.

Tanjungpandan, 20 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Belitung



HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
Pembina Tk. I
NIP.197505031997031003